#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena dia diciptakan dengan dibekali akal oleh penciptanya, dengan akal tersebutlah manusia Akan berfikir tentang keberlangsungan hidupnya. Manusia Akan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kehidupannya salah satunya yakni melalui pendidikan. Pendidikan merupakan elemen terpenting dalam proses perkembangan seseorang yang dapat melahirkan generasi yang berguna dan berakhlak mulia, disamping itu pendidikan merupakan teras pembangunan suatu masyarakat dan Negara, tanpa pendidikan masyarakat umumnya Akan mengalami kemunduran hidup disamping itu juga Akan menyebabkan keruntuhan moral. Pendidikan menurut UU No 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>2</sup>

Proses pendidikan agaknya tidak luput dari aktivitas pembelajaran, yang mana pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang ada di sekitarnya. Peserta didik

 $<sup>^2</sup>$  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

atau yang biasa disebut dengan siswa, murid, atau pelajar merupakan salah satu komponen yang ada dalam proses pembelajaran. Secara etimologi peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan *Timid* jamak-nya adalah *talamid*, yang artinya adalah "murid" maksudnya adalah "orang-orang yang mengingini pendidikan". Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah *talib*, jamak-nya adalah *thullab*, yang artinya adalah "mencari" maksudnya adalah "orang-orang yang mencari ilmu".<sup>3</sup>

Namun dalam proses pendidikan tidaklah luput dari berbagai macam permasalahan salah satunya dari segi kualitas mutu pendidikan yang saat ini masih menjadi masalah serius di Indonesia hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran, terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta mahalnya dana pendidikan. hal tersebut kini memicu adanya kasta dalam dunia pendidikan, yang seringkali kita mendengar adanya sebutan sekolah favorit yang mana sekolah tersebut merupakan gelar untuk sekolah-sekolah yang memiliki kualitas dan sarana prasarana yang lebih unggul dibandingkan sekolah lainnya, dan permasalahan tersebut menjadikan peserta didik lebih memilih untuk berlomba-lomba masuk ke sekolah berlabel favorit tersebut meskipun jauh dari tempat tinggal mereka. Akibatnya, kini banyak sekolah-sekolah yang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Indra Saputra, *Hakekat Pendidikan dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6 Tahun 2015, Hlm 92.

mengalami kemerosotan atau penurunan kualitas dan Akan selalu menjadi sekolah yang tertinggal jika masalah ini dibiarkan begitu saja.

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya dengan menetapkan kebijakan sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi ini merupakan kebijakan di sektor pendidikan yang telah diterapkan 5 tahun terakhir ini, yang mana awal diberlakukan nya adalah pada tahun ajaran 2017/2018. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan terutama di sistem persekolahan sebagaimana yang disebutkan sebagai sekolah favorit. Upaya ini dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Kebijakan sistem zonasi ini diterapkan melalui PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), sistem zonasi menjadi salah satu jalur dalam PPDB yang memiliki kuota terbanyak dibanding dengan jalur-jalur lainnya. Sistem zonasi ini berlaku untuk jenjang TK hingga SMA/ sederajat yang diatur dalam PERMENDIKBUD No 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi secara teknis didefinisikan bahwa pada proses PPDB mayoritas kuota daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam radius zona dan titik koordinat nya ditentukan oleh kebijakan teknis pemerintah daerah.

Sehubungan dengan adanya kebijakan tersebut SMAN 1 Sutojayan merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi, Sekolah ini menerapkan kebijakan sistem zonasi sudah sejak tahun 2017 pada saat sekolah masih ikut di daerah kabupaten akan tetapi mungkin lebih tepatnya disebut dengan semi zonasi, karena pada saat itu masih bercampur untuk pembagian wilayahnya kemudian juga untuk proses PPDB nya masih dikelola secara manual oleh kepanitiaan.<sup>4</sup> adanya sistem baru ini tentu menjadi tantangan sekolah dalam melaksanakannya, di dalam PPDB jalur zonasi ini pendaftaran dilaksanakan secara online dan server dikelola oleh pemerintah provinsi, Sekolah hanya menerima data peserta didik yang lolos seleksi tanpa mengikuti proses seleksi nya. Dengan adanya hasil data yang dikelola oleh pemerintah pusat tersebut menjadikan sekolah tidak dapat memprediksi kemampuan dari calon peserta didik barunya oleh karena itu sekolah harus mempersiapkan strategi pembinaan dan pengembangan peserta didik yang baik, agar saat menjalani proses pendidikan di sekolah peserta didik menjadi mampu berkembang sehingga nantinya sekolah Akan berhasil mencetak lulusan yang memiliki kualitas mutu tinggi.

Meski demikian sekolah yang menyandang gelar akreditasi A ini tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai sekolah yang unggul serta dapat dengan sigap menerima dan merespon kebijakan sistem zonasi, bahkan menurut keterangan dari kepala SMAN 1 Sutojayan adanya kebijakan ini dianggap sangat menguntungkan bagi sekolah, sejak

<sup>4</sup> Murdiono, Kepala SMAN 1 Sutojayan, Wawancara, Sutojayan, 3 Januari 2022.

menerapkan kebijakan zonasi ini SMAN 1 Sutojayan mengalami peningkatan jumlah peserta didik dan sekolah juga menjadi bagian dari 1000 sekolah TOP nasional dengan rangking 762, hal ini merupakan sebuah kebanggaan untuk sekolah. Meskipun SMAN 1 Sutojayan letaknya berada di pinggiran akan tapi setidaknya sudah mampu masuk dalam kategori TOP 1000 sekolah nasional tersebut.<sup>5</sup>

Disamping itu prestasi-prestasi yang dimiliki peserta didik di SMAN 1 Sutojayan merupakan bukti berhasilnya sekolah dalam membina peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non akademik. SMAN 1 Sutojayan juga memiliki program pembinaan peserta didik yang beragam dan berkualitas dalam rangka memfasilitasi beragam potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu program unggulan di SMAN 1 Sutojayan yaitu program *Double Track* yang mana program ini merupakan program yang baru dijalankan kembali sekitar 1 tahun belakangan ini dan mendapatkan respon positif dan menjadikan sekolah ini lebih maju. Meskipun program *Double Track* ini tergolong baru di SMAN 1 Sutojayan Akan tetapi program ini telah berhasil memperoleh gelar prestasi yaitu Juara 1 sekolah pendatang terbaik dan Juara 3 video KUS (Kelompok Usaha Siswa) terbaik. Program *Double Track* ini merupakan program keterampilan dan kewirausahaan yang secara resmi diatur oleh pemerintah. Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Manajemen

<sup>5</sup> Murdiono, Kepala SMAN 1 Sutojayan, *Wawancara*, Sutojayan, 3 Januari 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Syahrul Ssntoso, Ketua OSIS SMAN 1 Sutojayan, Wawancara, 14 Desember 2021.

Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. (studi kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutojayan, Blitar)".

# B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah, Manajemen Peserta Didik yang meliputi Analisis Kebutuhan Peserta Didik Baru, Rekrutmen Peserta Didik Baru, serta Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutojayan Blitar).

Adapun Pertanyaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Analisis Kebutuhan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar?
- b. Bagaimana Sistem Rekrutmen Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar?
- c. Bagaimana Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar?

# C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kebutuhan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar
- Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Sistem Rekrutmen Peserta
   Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1
   Sutojayan Blitar
- Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Baru dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi dunia pendidikan terutama pada lingkup Manajemen Peserta Didik. Pada penelitian ini terdapat dua aspek manfaat, yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai acuan dasar pengembangan penelitian berikutnya tentang manajemen peserta didik.

## 2. Secara Praktis

Penelitian tentang manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar ini, diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

## a. Bagi Lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi dalam melaksanakan manajemen peserta didik.

### b. Bagi kepala sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer lembaga pendidikan, untuk lebih tepat dalam mengambil kebijakan serta strategi pendidikan yang diterapkan berdasarkan kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah.

### c. Bagi guru

Sebagai salah satu faktor utama dalam pembelajaran, guru diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini, sebagai bahan analisis dan pertimbangan dalam mengembangkan pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, efektif, dan efisien.

## d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah sejenis sebagai bahan referensi tambahan.

### E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yang tertulis dari judul penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan definisi yang tepat dan batasan istilah yang

digunakan agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Penegasan Konseptual

Secara konseptual, penegasan istilah dalam penelitian ini Akan dijelaskan sebagai berikut:

## a. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik atau *Pupil Personnel Administration* adalah layanan yang memusatkan perhatian pada
pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di
luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual
seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan
sampai ia matang di sekolah.

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.<sup>7</sup> Dengan demikian manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. <sup>8</sup>

<sup>8</sup> Pratiwi Bernadetta Purba, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*, Cet. Ke 1, (Deli Serdang: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hlm 95.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Suwardi dan Daryanto, *Manajemen Peserta Didik*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), Hlm 98-99.

Manajemen peserta didik memiliki 8 ruang lingkup, 3 diantaranya adalah analisis kebutuhan, sistem rekrutmen, serta pembinaan dan pengembangan peserta didik.

Analisis kebutuhan peserta didik merupakan langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan (sekolah). Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah merencanakan jumlah peserta didik yang Akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik.

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Langkah-langkah rekrutmen peserta didik (siswa baru) meliputi pembentukan panitia penerimaan siswa baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka.

Pembinaan dan pengembangan peserta didik adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan, dalam hal ini bakat,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar, *Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2015), Hlm 37-39.

minat dan kemampuan peserta didik harus di tumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 10

## b. Implementasi

Implementasi menurut B. R. Ripley dan G. A. Franklin sebagaimana dikutip dalam Budi Winarno adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.<sup>11</sup>

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 12

Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. <sup>13</sup>

11 Akhmad Rafi'i dkk, *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Intang Ninggi II Kecamatan Taweh Selatan Kabupaten Barito Utara)*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm 11.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Peserta Didik (Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran)*, (Medan: Widya Puspita, 2018), Hlm 17.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020, Hlm 133.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Hlm 2.

# c. Kebijakan

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang. Ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus.

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik.<sup>14</sup>

Menurut Ealau dan Pewit kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan. Kebijakan dapat diwujudkan dengan Cara pembuatan UU, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/ sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sholih Muadi, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Volume 06 Nomor 02 Tahun 2016, Hlm. 197-198.

keputusan pemerintah, kebijakan dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah.<sup>15</sup>

### d. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. 16 Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. 17

### 2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan istilah secara operasional dalam penelitian yang berjudul "Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutojayan Blitar)" merupakan upaya manajerial suatu lembaga dalam mengelola peserta didik yang inputnya diperoleh melalui hasil dari

5.

<sup>16</sup> Reza Aulia R dkk, *Kumpulan Teks Argumentasi Jejak Milenial di Era Revolusi Industri* 4.0, (Sukabumi: Cv Jejak Publisher, 2020), Hlm 120.

-

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Uddin B. Sore, dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: Cv Sah Media, 2017), Hlm 3-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Irjus Indrawan dkk, *Manajemen Peserta Didik*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hlm 26-27.

penerapan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Sutojayan Blitar, dalam hal ini manajemen peserta didik meliputi analisis kebutuhan peserta didik baru, sistem rekrutmen peserta didik baru, serta pembinaan dan pengembangan peserta didik baru yang berkenaan dengan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Sutojayan Blitar.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, penulis mendeskripsikan sebagai berikut:

Bab I, adalah Pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian teori yang berisi pembahasan teori yang terkait dengan judul penelitian sebagai dasar dalam pembahasan objek penelitian. Dalam Bab ini terdiri dari kerangka teori yang memuat penjelasan manajemen peserta didik, kebijakan sistem zonasi, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab III, adalah Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, adalah Hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data dan temuan penelitian.

Bab V, adalah Pembahasan. Dalam Bab ini diuraikan analisis dari data dan temuan penelitian yang dideskripsikan dalam Bab sebelumnya.

Bab VI, adalah Penutup. Berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.